

PRINSIP STANDAR KERJA DEWAN KEAMANAN PBB SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERANG SAUDARA YAMAN

Yolanda Putri Aulia

Universitas Singaperbangsa Karawang

Tio Ari Pratama

Universitas Singaperbangsa Karawang

Prilla Marsingga

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak: Perang Saudara Yaman, yang berlangsung sejak 2014 antara Pemerintah Yaman dan Kelompok Houthi, telah menyebabkan ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, serta bencana kemanusiaan. Konflik berkepanjangan ini menarik perhatian dunia internasional karena dampaknya yang meluas. Sebagai organisasi internasional, Dewan Keamanan PBB berperan dalam upaya perdamaian dengan menjadi mediator dan fasilitator konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis peran PBB dalam resolusi konflik Yaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah mendorong gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan melalui prinsip mediasi seperti Impartiality, Mutuality, Sustainability, dan Accountability guna mencapai resolusi konflik yang efektif.

Kata Kunci: Yaman, Manajemen Konflik, Prinsip Mediasi, DK PBB

Abstract: The Yemeni Civil War, ongoing since 2014 between the Yemeni government and the Houthi group, has led to political instability, economic crises, and humanitarian disasters. The prolonged conflict has drawn international attention due to its widespread impact. As an international organization, the United Nations Security Council (UNSC) plays a role in peace efforts by acting as a mediator and facilitator in the conflict. This study employs a qualitative descriptive approach based on literature review to analyze the UNSC's role in resolving the Yemeni conflict. The findings indicate that the UNSC has promoted ceasefires and sustainable peace through mediation principles such as Impartiality, Mutuality, Sustainability, and Accountability to achieve an effective conflict resolution.

Keywords: Yemen, Conflict Management, Mediation Principles, UN Security Council

Article History: Received 22 September 2024, Revised: 28 October 2024, Accepted: 08 December 2024, Available online 15 January 2025

PENDAHULUAN

Konflik menurut teori HI arus utama adalah keadaan yang alami terjadi di kehidupan internasional dan akan tetap menjadi pembahasan sentris di dalam topik hubungan internasional. Dalam hal ini, konflik bersenjata masih menjadi primadona sejak berabad-abad silam hingga abad kontemporer saat ini. Sebagian besar konflik bersenjata yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung di dunia kontemporer termasuk dalam tipe konflik bersenjata non-internasional (*intrastate armed conflicts*).

Tipe konflik ini terjadi di dalam sebuah negara, antara pihak pemerintah berdaulat (*sovereign entity*) melawan pihak lain yang bukan pemerintah.¹ Kontra pemerintah termasuk kelompok bersenjata terorganisir seperti kelompok milisi dapat dikatakan sebagai gerakan separatis atau pemberontak. Contoh tipe konflik ini seperti perang saudara (*civil war*) yang memperebutkan kontrol atas negara, sumber daya, wilayah ataupun hak-hak tertentu. Dalam konvensi Jenewa, konflik bersenjata non-internasional diatur dalam Pasal 3 ketentuan bersama (*common articles*) Konvensi Jenewa 1949.² Protokol Tambahan II melengkapi Pasal 3 yang memberikan definisi terkait konflik bersenjata tipe ini: '*konflik bersenjata yang terjadi wilayah Pihak Peserta Agung (High Contracting Party) antara angkatan bersenjataanya dan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya, di bawah komando bertanggung jawab, menjalankan kendali atas sebagian wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu....*'.³

Dengan ini, konflik bersenjata noninternasional biasanya lebih kompleks dengan pihak-pihak yang terlibat terbagi dalam beberapa golongan sesuai peran dan tujuannya dalam konflik tersebut sehingga lebih

¹ M. Prakoso Aji and Jerry Indrawan, "Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional Understanding Peace Studies As Part of International Relations," *Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 3 (2019): 65–83, doi: <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637>.

² Permanasari, A. (2009, February 05). Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Konflik Internal. Pasal yang "ajaib"! WordPress. <https://arlina100.wordpress.com/2009/02/05/pasal-3-konvensi-jenewa-1949-tentang-konflik-internal-pasal-yangajaib/>

lama terjadi daripada konflik bersenjata antar-negara. Seperti topik yang akan penulis bahas, Perang Saudara Yaman sudah terjadi sejak 2014 dan eskalasi konflik masih tetap berlanjut dan semakin kompleks dengan keterlibatan pihak-pihak internasional di dalam keputusan politik dan militer terhadap konflik di Yaman.

Gejolak politik mengguncang negaranegara Timur Tengah yang dikenal dengan peristiwa *Arab Spring* pada tahun 2011. Musim Semi Arab merupakan suatu gerakan demonstrasi menentang rezim otoritarianisme yang sudah mengakar di negara-negara Arab dengan menuntut sistem pemerintahan yang pro-demokratis. Gelombang pertama *Arab Spring* terjadi di Tunisia dan Mesir yang selanjutnya meluas ke Libya, Suriah hingga Yaman. Peristiwa *Arab Spring* memicu gerakan protes di Yaman menentang pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang telah memimpin selama 33 tahun antara tahun 1978 hingga 2012 yang selanjutnya dikenal sebagai Revolusi Yaman. Revolusi bermula dengan para pemuda Yaman memulai protes di ibu kota Sana'a untuk perubahan pemerintah yang lebih baik. Penggulingan rezim otoriter berhasil dan pemilu dilaksanakan dengan terpilihnya presiden baru Abdrabbuh Mansour Hadi pada Februari 2012. Namun, pemerintahan baru tidak mampu menangani masalah pangan, ekonomi serta politik pasca *Arab Spring* sehingga menjadi celah bagi kelompok pemberontak Houthi untuk merebut kekuasaan pemerintah resmi yang terpilih secara demokratis yang secara luas dikenal sebagai Perang Saudara Yaman.

Pertama, kita perlu memahami dengan cermat latar belakang dan konteks konflik di Yaman yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Konflik ini tidak bisa direduksi menjadi sekedar pertarungan antara pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi melainkan melibatkan dimensi yang sangat kompleks yang mencakup unsur etnis, agama, dan geopolitik. Permasalahan ini mengenai penyebab konflik ini menunjukkan sejumlah faktor berbeda yang menciptakan lanskap kompleks. Kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang korup adalah salah satu penyebab utama konflik ini. Masyarakat Yaman merasakan dampak langsung dari kebijakan yang tidak adil dan korup yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap pejabat pemerintah. Sengketa pemilu dan

tuduhan korupsi di badan-badan pemerintah daerah dan pusat semakin memicu ketidakpuasan ini. Akumulasi ketidakpuasan ini menjadi pendorong kuat lahirnya gerakan pemberontak.

Selain itu, perbedaan pendapat mengenai kebijakan tertentu juga menjadi faktor penting dalam konflik di Yaman. Berbagai kelompok masyarakat, khususnya di wilayah Utara, merasa terpinggirkan dan tidak terwakili secara adil dalam pengambilan keputusan nasional. Hal ini menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan sosial serta memungkinkan kelompok pemberontak seperti Houthi memperoleh dukungan publik. Selain itu, dimensi etnis dan agama merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Houthi, kelompok pemberontak yang berasal dari kelompok etnis Syiah Zaidi, mendapat dukungan kuat dari Muslim Syiah di Yaman. Oleh karena itu, konflik ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan politik, namun juga memiliki dimensi keagamaan yang penting, sehingga memperumit dinamika konflik.

Korban utama konflik ini adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Infrastruktur yang hancur dan terbatasnya akses terhadap bantuan kemanusiaan telah mengakibatkan kondisi kehidupan yang sulit bagi jutaan warga Yaman. Penting untuk menyadari bahwa pemahaman mendalam tentang penyebab konflik ini memberikan dasar penting untuk mengembangkan strategi penyelesaian yang efektif. Sebagai organisasi internasional, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran yang sangat penting dalam menanggapi konflik-konflik tersebut, dimana aspek kemanusiaan dan politik saling terkait erat. Perang saudara yang melibatkan Yaman selama beberapa tahun terakhir telah menjadi fokus perhatian dunia internasional. Dalam tinjauan manajemen konflik ini, kami akan membahas berbagai apakah Dewan Keamanan PBB memenuhi prinsip standar kerja sebagai mediator untuk menyelesaikan perang saudara Yaman.

Pada Penelitian Aufa Rabbi Fudhali berjudul *“Studi Deskriptif-Integrasi Pendanaan Upaya PBB di Yaman Selama Perang Sipil 2015-2020”* membahas peran PBB dalam menangani konflik Yaman melalui Perjanjian Stockholm. Fudhali menggunakan konsep sistem internasional, perdamaian PBB, Maqashid al-Shari'ah, dan resolusi konflik untuk menganalisis upaya PBB dalam membangun perdamaian sejak 2015.

Penelitiannya menyoroti bagaimana norma dan aturan sistem internasional mempengaruhi efektivitas tindakan PBB. Selain itu, ia menilai keselarasan kebijakan PBB dengan prinsip Syariah, menggarisbawahi dimensi keagamaan dalam konflik Yaman. Namun, Fudhali cenderung menyamakan resolusi konflik dengan Perjanjian Stockholm, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam konteks dan dampak.

Penelitian ini membuka peluang eksplorasi lebih lanjut mengenai integrasi PBB dengan nilai lokal dan budaya Yaman guna mencapai perdamaian yang lebih efektif.³

Penelitian Intan Permata Sari dalam “Konflik Internal Negara Yaman yang Melibatkan Negara-Negara di Timur Tengah” menganalisis konflik Yaman sejak Arab Spring 2010. Studi ini menyoroti peran kelompok Houthi, yang berasal dari Sa’adah, dalam memperjuangkan hak sosial, ekonomi, dan politik, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang korup. Penelitian ini juga membahas dampak kemanusiaan, dengan lebih dari 10.200 anak menjadi korban konflik, serta kelaparan dan putus sekolah yang meluas. Selain itu, studi ini mengkaji intervensi negara-negara Timur Tengah, terutama Koalisi Arab pimpinan Saudi sejak 2015, dalam mendukung pemerintah Yaman. Upaya negosiasi antara pemerintah Saudi dan Houthi serta pelanggaran pembatasan di bandara Sana’a dan pelabuhan Hodeida diharapkan dapat meningkatkan akses kemanusiaan dan menjadi langkah menuju perdamaian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi ini dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam dan pemahaman komprehensif tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan permasalahan perang saudara Yaman. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk

³ Fudhali, A. R. Studi Deskriptif integratif Upaya PBB dalam Mewujudkan Perdamaian Di Yaman Selama Kurun Perang Sipil 2015 Hingga 2020. Jurnal Prodi Hubungan Internasional, 2 no.1 (2022): 75-90.

mengeksplorasi lebih detail kompleksitas dan dinamika konflik serta memahami dampak dan efektivitas intervensi Dewan Keamanan PBB. Langkah pertama penelitian ini adalah pemilihan data yang cermat. Penulis dengan cermat memilih sumber yang relevan dan dapat dipercaya, termasuk jurnal ilmiah, situs resmi PBB, laporan bantuan kemanusiaan, dan sumber terpercaya lainnya. Dengan mempelajari literatur melalui penelitian literatur, penulis dapat memastikan bahwa data primer yang digunakan dalam penelitian ini sangat akurat dan terpercaya. Proses penelitian dilakukan dari berbagai sumber, antara lain masalah keamanan, manajemen konflik, publikasi akademis dan perdamaian. Informasi yang diperoleh dari literatur ini memberikan dasar untuk pemahaman mendalam tentang konteks permasalahan yang dihadapi Yaman dan peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan situasi tersebut. Secara rinci, peneliti menciptakan landasan teori yang kuat untuk analisis lebih lanjut atas pernyataan dan posisi yang terdapat dalam literatur.

Tahap penelitian selanjutnya terkait dengan pemilihan bahan yang cermat. Fokusnya adalah pada isu-isu yang paling terkait dengan peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan perang saudara di Yaman. Peneliti juga menekankan keandalan sumber dan memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Pemilihan informasi ini merupakan langkah penting dalam mendukung validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Setelah informasi dipilih, peneliti beralih ke tahap ideasi dan reformulasi ide. Ini berarti memparafrasekan informasi yang ditemukan dalam literatur dengan kata-kata peneliti sendiri, menghindari plagiarisme dan memastikan bahwa pemahaman peneliti tercermin dengan jelas dalam tulisan. Proses parafrase memasukkan informasi dan membentuk opini pribadi tentang permasalahan yang sedang dipertimbangkan. Sebagai Langkah selanjutnya, penulis menafsirkan informasi yang diperoleh ke dalam kerangka berpikir.

Dalam hal ini, penulis menggunakan perspektif keselamatan dan perdamaian untuk memandu diskusi lebih lanjut. Perspektif ini dinilai penting mengingat peran Dewan Keamanan PBB yang sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Interpretasi data dilakukan secara cermat, mencari hubungan antara

informasi yang ditemukan dengan kerangka pemikiran yang dibuat. Terakhir, peneliti menyusun hubungan variabel-variabel dalam pembahasan manajemen konflik. Hal ini memerlukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana Dewan Keamanan PBB mencoba mengelola konflik di Yaman, mengidentifikasi strategi dan taktik serta menilai dampaknya terhadap situasi di lapangan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi kontribusi spesifik prinsip standar kerja Dewan Keamanan PBB terhadap pencapaian tujuan perdamaian dan keamanan di tengah konflik yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MEKANISME MANAJEMEN KONFLIK DEWAN KEAMANAN PBB

Manajemen konflik merupakan pendekatan yang tidak hanya berbicara bagaimana menangani konflik, tetapi juga bagaimana pengelolaan konflik dengan cara-cara kekerasan atau kompetitif dan non-kekerasan atau kooperatif. Dengan ini, manajemen konflik dapat dipahami dengan mudah sebagai upaya mengontrol atau mengatur konflik yang terjadi antara dua negara, banyak negara, atau di dalam negara. Dalam upaya manajemen konflik biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai pihak fasilitator, mediator dan negosiator dengan tujuan untuk mencegah eskalasi konflik menjadi lebih luas serta meminimalisir kerusakan lingkungan, infrastruktur maupun korban jiwa.

Manajemen konflik memiliki tujuan utama yaitu meraih kepentingan bersama yang tidak hanya terkait pada pihak bertikai namun semua pihak internasional dikenal dengan keamanan kolektif yang mengikat. Keterlibatan pihak ketiga yang netral dalam mekanisme manajemen konflik sangat ditekankan perannya dalam menengahi suatu konflik. Peran seperti ini, sepatutnya diserahkan kepada otoritas internasional yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik yang terjadi di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) telah memegang peranan krusial dalam menjaga perdamaian dunia sejak didirikan pada

tahun 1945.⁴ PBB ditujukan terutama untuk mencegah perang besar terjadi kembali, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta mempererat hubungan antar negara yang diatur berdasarkan dasar hukum yang dibentuk atas persetujuan negaranegara anggotanya. Hal ini tercermin pada permasalahan Perang Saudara di Yaman.

Dewan Keamanan PBB (*UNSC*) merupakan badan utama PBB yang mempunyai tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga keamanan dunia internasional. Dewan Keamanan memiliki 15 anggota dewan yang mewakili negara anggota tetap dan anggota tidak tetap. Dalam halnya konflik antar-negara maupun konflik internal negara, DK PBB bersidang untuk menyerukan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai seperti merekomendasikan ketentuan atau langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, DK PBB dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak sengketa yang melanggar ketentuan dan dapat memutuskan pengerahan pasukan perdamaian ke dalam wilayah konflik. Badan-badan PBB terutama Dewan Keamanan dalam menyelesaikan sengketa konflik seperti praktik-praktik yang diterapkan dan keputusan yang dikeluarkan dalam forum telah lebih jauh berkontribusi pada pengembangan fungsi-fungsi dengan tujuan terciptanya perdamaian.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan perang Yaman sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Dengan ini, PBB melalui Dewan Keamanan berupaya menginisiasi jalan terbaik untuk menghentikan eskalasi Perang Saudara yang turut melibatkan kekuatan lain dan yang terutama untuk mencari jalan keluar konflik menuju terciptanya perdamaian negatif dan harapan pada perdamaian positif dalam manajemen konflik di Yaman. Jika mengacu pada pendekatan perdamaian menurut Galtung (2007), proses manajemen konflik dilakukan dengan gencatan senjata dengan tidak adanya bentuk kekerasan atau eksploitasi sebagai capaian *negative peace* (-P). Dewan Keamanan PBB menyerukan “perdamaian inklusif” kepada pihak-pihak yang terlibat dan

⁴ Fadila, R. “Peran PBB dalam Menjaga Perdamaian Dunia.” Wartadinus. October 24, 2023. <https://warta.dinus.ac.id/2023/10/24/peran-pbb-dalam-menjaga-perdamaiaandunia/>

secara resmi gencatan senjata yang diinisiasi oleh Dewan Keamanan disepakati pada bulan April 2022. Kesepakatan gencatan senjata terus dipertahankan hingga diperbarui selama bulan Juni dan Agustus di tahun yang sama. Gencatan senjata tersebut mendorong adanya upaya-upaya manajemen konflik seperti terbukanya akses bantuan kemanusiaan dan terutama penekanan terhadap tindakan eksploitasi korban jiwa di seluruh wilayah konflik. Korban jiwa menurun tajam sekitar 85% dalam dua bulan pertama perjanjian.⁵ Laporan kematian akibat kekerasan politik antara bulan April dan September 2022 secara konsisten lebih rendah dibanding bulan-bulan lainnya sejak Januari 2015.

Capaian luar biasa ini cukup diterima melihat kondisi konflik dan dampak akibat selama gencatan senjata menurun sampai perjanjian gencatan berakhir pada bulan Oktober 2022 dengan pihak-pihak terkait masih menahan diri untuk tidak bertindak lebih ofensif pada eskalasi perang besar-besaran. Meskipun periode gencatan senjata berakhir, PBB tetap mendukung pihak-pihak untuk menyambut momentum perdamaian dan gencatan senjata inisiasi PBB sebelumnya menjadi peluang terbaik dialog untuk menuju perdamaian selanjutnya yang lebih kuat dan berkelanjutan. DK PBB turut memberlakukan sanksi internasional bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman seperti embargo senjata terhadap fraksi Houthi pada bulan Februari 2022 yang diperpanjang hingga pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap petinggi fraksi tersebut sampai 15 November 2022. Dewan Keamanan meyakini kelompok Houthi mengancam proses perdamaian, keamanan, dan stabilitas negara Yaman. Dibuktikan dengan serangan senjata fraksi Houthi di perbatasan Yaman-Arab Saudi pada bulan September yang mengakibatkan empat korban jiwa. Di sisi lain, Dewan Keamanan juga prihatin terkait pelanggaran HAM seperti penembakan atau serangan udara terhadap wilayah warga sipil tanpa pandang bulu yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik Yaman tersebut.

⁵ Stark, A. "A Precarious Moment For Yemen's Truce." RAND Corporation. December 13, 2023. <https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/12/a-precious-moment-for-yemens-truce.html>.

PRINSIP-PRINSIP MEDIASI YANG DITERAPKAN OLEH DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PERANG YAMAN

Bagian Menurut Hugh Miall dan Christopher Mitchell (1999), terdapat 8 (delapan) poin yang harus dipenuhi oleh negara atau organisasi internasional. Prinsip-prinsip komunitas internasional dalam penyelesaian konflik bertumpu pada delapan kriteria seperti; *Impartiality*, *Mutuality*, *Sustainability*, *Complementary*, *Reflexivity*, *Consistency*, *Accountability*, dan *Universality*. Prinsip-Prinsip ini menjadi acuan serta norma bagaimana pihak ketiga dapat masuk dan diterima dalam suatu konflik sehingga tidak memungkinkan pihak asing dengan kepentingan tertentu memperkeruh konflik dan proses penyelesaiannya. Penulis menggunakan indikator ini untuk melihat apakah PBB membantu menyelesaikan persoalan Perang Saudara Yaman dengan prinsip netralitas atau tidak.

Indikator pertama adalah *Impartiality*, menegaskan bahwa proses resolusi konflik belum bisa dikatakan tuntas sampai pihak yang terlibat dalam melakukan konflik mendapatkan kepentingannya dan terlindungi. Dalam perang saudara di Yaman, Dewan Keamanan PBB dapat menjadi mediator atau penyedia bantuan kemanusiaan. Tujuan Dewan Keamanan PBB sebagai mediator adalah untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, mendengarkan keinginan dan kepentingan mereka serta membantu menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Prinsip netralitas menjadikan PBB sebagai yang tidak terlalu memihak atau mendukung demi terwujudnya perdamaian berkelanjutan. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga menerapkan prinsip netralitas ketika memberikan bantuan kemanusiaan untuk memastikan bahwa yang diberikan oleh PBB adil dan mencakup semua kelompok yang terkena dampak konflik tanpa memihak pihak manapun. Dengan memastikan bahwa semua pihak merasa didengarkan dan dihargai, Dewan Keamanan PBB pula sangat melindungi kepentingan dari masing-masing pihak, hal ini terlihat dengan terus dilakukannya negosiasi dan juga pemberian bantuan kemanusiaan tanpa memandang pihak. Maka dari hal tersebut terlihat bahwa Dewan Keamanan PBB berusaha bekerja lebih konstruktif untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan bagi rakyat Yaman.

Indikator kedua adalah *Mutuality*, mensyaratkan bahwa dalam melakukan intervensi setiap pihak yang terlibat harus terbuka dalam intervensi tersebut dan dilihat sebagai langkah yang positif. Sebagai mediator yang terlibat dalam penyelesaian perang saudara Yaman, PBB menganut prinsip netralitas. Berdasarkan prinsip tersebut, Dewan Keamanan PBB haruslah bersikap netral dan tidak boleh memihak pemerintah Yaman atau kelompok pemberontak Houthi. Keamanan dan hak semua pihak yang berkonflik harus diutamakan, mengingat beratnya bahwa Dewan Keamanan PBB berupaya dengan memastikan bahwa solusi apapun merupakan bentuk keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Untuk memenuhi perannya sebagai penjaga keadilan, Dewan Keamanan PBB sangat diharapkan untuk memastikan bahwa proses mediasi dan penyelesaian konflik di Yaman melibatkan semua pihak yang terlibat. Artinya, aspirasi dan kebutuhan pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi harus diakui dan dipertimbangkan secara adil. Dalam konteks ini, keadilan adalah kunci untuk membangun fondasi perdamaian abadi. Dalam menangani perang saudara, PBB juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam perlakuannya terhadap para pihak. Prinsip ketidakberpihakan mengharuskan semua pihak berpartisipasi secara setara dalam setiap solusi yang diminta, dan tidak ada seorang pun yang didiskriminasi atau diperlakukan tidak adil. Kegiatan mediasi harus memberikan keadilan kepada seluruh peserta konflik dan memastikan bahwa masing-masing pihak mempunyai ruang untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhannya. Dalam hal *Mutuality*, Dewan Keamanan bertindak dengan tetap sebagai pihak yang netral dalam konflik, tidak secara terang-terangan mendukung satu pihak untuk memenangkan konflik dengan tindakan kekerasan karena intervensi Dewan Keamanan dalam konflik untuk mencari titik terang atau jalan keluar dari konflik tanpa adanya pihak yang menang. Dewan Keamanan memberikan sanksi internasional tidak hanya ke salah satu pihak namun juga setiap pihak yang melanggar perjanjian dan ketentuan hukum humaniter atau hukum perang internasional. Secara implisit, pemerintah resmi Republik Yaman yang terlibat dalam perang saudara diakui secara internasional oleh banyak negara dan oleh PBB itu sendiri namun hal ini bukan menjadi tujuan PBB untuk mendukung

pemerintah resmi. Dapat dilihat bahwa PBB mendorong pemerintah resmi dan pemerintah Houthi untuk berdialog secara langsung yang di mediasi oleh perwakilan dari Dewan Keamanan PBB sendiri dan juga dialog yang dimediasi oleh negara lain.

Indikator ketiga adalah *Sustainability*, memiliki makna bahwa jika pihak yang akan melakukan intervensi tidak berani untuk bekerja dalam waktu lama yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah konflik, maka sebaiknya jangan pernah melakukan intervensi karena sia-sia hanya akan menambah kerumitan sebuah masalah. Dalam memenuhi perannya sebagai mediator, Dewan Keamanan PBB harus memastikan bahwa upayanya untuk menyelesaikan konflik di Yaman tidak hanya bersifat sementara namun juga cukup berkelanjutan. Kunci dari konsep keberlanjutan adalah kesediaan Dewan Keamanan PBB untuk berkomitmen pada periode ini. waktu yang dibutuhkan untuk membangun fondasi perdamaian abadi. Artinya, PBB harus memiliki ketahanan dan fleksibilitas untuk terus terlibat dalam dinamika konflik di Yaman, tidak hanya merespons situasi saat ini, namun juga menatap masa depan untuk menemukan solusi jangka panjang. Penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk melanjutkan aktivitas intervensi dan mediasinya. Ketahanan dalam hal ini mencakup kemampuan Dewan Keamanan PBB untuk bertahan dan mempertahankan keterlibatannya dalam penyelesaian konflik di Yaman dalam menghadapi kemungkinan hambatan dan tantangan. Artinya Dewan Keamanan PBB harus memiliki strategi yang adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi dan memastikan bahwa setiap langkah berdampak positif dalam mencapai perdamaian abadi. Dalam proses gencatan senjata inisiasi Dewan Keamanan PBB April-Oktober 2022 turut memegang prinsip *Sustainability*. Walaupun proses gencatan berakhir, pihak-pihak yang terlibat konflik mampu untuk menahan diri dari eskalasi konflik penuh. Serangan yang terjadi tidak terlalu besar sehingga kuantitas korban jiwa tidak kembali ke angka selama konflik sebelum gencatan senjata. Dapat dikatakan adanya keberlanjutan nilai-nilai mediasi yang dilakukan Dewan Keamanan PBB dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua pihak setelah gencatan senjata. Ditambah pihak PBB mendukung inisiatif dialog keberlanjutan untuk terjadinya gencatan senjata tahap berikutnya supaya resolusi perdamaian panjang dapat tercipta di Yaman.

Indikator keempat adalah *Complementary*, mengimplikasikan bahwa jika penyelesaian sebuah konflik melibatkan beberapa pihak yang melakukan intervensi, maka masing-masing pihak harus sampai pada kesepakatan bahwa intervensi yang mereka lakukan saling melengkapi. Sebagai mediator, Dewan Keamanan PBB harus bekerja secara sinergis dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi, serta negaranegara kawasan atau pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Sebagai Indikator keempat dalam penyelesaian konflik, komplementer menegaskan bahwa ketika intervensi terlibat dari beberapa pihak, setiap intervensi tersebut haruslah saling melengkapi. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik harus bekerja bersama-sama untuk mencapai solusi yang komprehensif dan efektif. Proses mediasi dan intervensi yang dilakukan oleh PBB haruslah saling melengkapi upaya pihak lain untuk menciptakan solusi yang holistik. Kerja sama dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat sangat penting dalam mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Dewan Keamanan PBB tidak bisa bekerja sendiri, ia perlu memperkuat upaya pihak lain dan bekerja bersama-sama untuk mengatasi kompleksitas konflik di Yaman. Dalam konteks ini, prinsip komplementer menjadi landasan yang penting untuk mencapai keseimbangan dan keberhasilan dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Salah satu contoh konkret dari penerapan prinsip komplementer dalam penyelesaian konflik di Yaman adalah melalui koordinasi antara PBB dan pemerintah Yaman. PBB telah berupaya untuk mendukung pemerintah Yaman dalam memperkuat kapasitasnya dalam menangani krisis kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik. Ini termasuk memberikan bantuan teknis dan finansial, serta melalui program-program pengembangan yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar di Yaman. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga bekerja sama dengan kelompok pemberontak Houthi dalam upaya untuk mencapai gencatan senjata dan pembicaraan perdamaian. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan konflik kepentingan di antara kedua belah pihak, Dewan Keamanan PBB berusaha untuk menjaga komunikasi terbuka dan memfasilitasi dialog antara mereka. Hal ini merupakan contoh nyata dari bagaimana prinsip komplementer diterapkan dalam mediasi konflik di Yaman. Selain bekerja dengan

pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi, Dewan Keamanan PBB juga berkoordinasi dengan negara-negara kawasan dan aktor internasional lainnya dalam upaya penyelesaian konflik. Dalam melaksanakan prinsip komplementer, Dewan Keamanan PBB juga memperhatikan aspek kemanusiaan dari konflik di Yaman. Bantuan kemanusiaan disalurkan dengan memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terkena dampak, tanpa memihak atau diskriminatif. Dengan mengadopsi prinsip komplementer dalam upaya penyelesaian konflik di Yaman, Dewan Keamanan PBB berharap dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam mengatasi perang saudara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Kerja sama yang solid antara semua pihak yang terlibat diharapkan dapat membawa Yaman menuju perdamaian dan stabilitas yang lebih baik di masa depan.

Indikator kelima adalah *Reflexivity*, yang menjadi pegangan bahwa motivasi keinginan dan tujuan dari setiap pihak yang ingin menyelesaikan konflik haruslah baik. Dalam konteks perang saudara Yaman, Dewan Keamanan PBB sebagai mediator harus menerapkan prinsip reflektivitas, berpikir dan melakukan refleksi terhadap peran dan dampaknya terhadap konflik. Dewan Keamanan PBB harus terusmenerus melakukan refleksi terhadap strategi mediasi dan tindakan yang diambil memastikan bahwa pendekatannya konsisten dengan dinamika konflik yang sedang berlangsung. Dalam situasi konflik yang kompleks, Dewan Keamanan PBB telah membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dan merevisi pendekatannya sesuai dengan perkembangan terkini, termasuk perubahan dinamika politik dan keamanan Yaman. Selain itu, prinsip reflektivitas mencakup identifikasi kelemahan. Dalam hal ini menguntungkan Dewan Keamanan PBB, karena dapat lebih efektif dalam mengelola proses penyelesaian konflik. Hal ini juga memberikan peluang bagi Dewan Keamanan PBB untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para pihak, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kredibilitas Dewan Keamanan PBB sebagai mediator yang tidak memihak dan tidak mengikat. Dalam menghadapi perang saudara di Yaman, prinsip reflektivitas adalah alat penting, Dewan Keamanan PBB perlu mempertahankan peran mediasi yang tepat dan efektif.

Indikator keenam adalah *Consistency*, yang dimana harus menunjukkan bahwa setiap suasana atau kondisi yang sama mendapat jaminan untuk mendapatkan respon yang sama. Dewan Keamanan PBB harus menunjukkan bahwa respons dan pendekatannya terhadap berbagai kondisi atau situasi konflik di Yaman konsisten, adil, dan tidak memihak. Pentingnya konsistensi dalam menangani konflik terlihat dari perlakuan berbagai pihak di Dewan Keamanan PBB, termasuk pemerintah dan kelompok pemberontak Houthi. Hal ini terlihat dengan upaya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yang tidak menawarkan bahkan secara terang-terangan melakukan perlakuan berbeda yang tidak adil atau tidak konsisten kepada pihak-pihak yang terlibat konflik yang dapat mengancam kepercayaan dan kredibilitas mediasi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, konsistensi juga mencakup penerapan aturan dan norma internasional yang setara tanpa memihak satu partai politik tertentu. Dewan Keamanan PBB harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan dan perdamaian. Dengan cara ini, Dewan Keamanan PBB telah membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman dan menciptakan landasan yang kuat untuk proses mediasi. Selain itu, kesinambungan mencakup tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk campur tangan dalam dinamika perubahan suatu konflik mendekati perubahan atau perkembangan baru dalam situasi Yaman, Dewan Keamanan PBB harus tetap tegas dalam upaya mediasinya dengan berpegang pada prinsip koherensi untuk menghindari potensi perbedaan atau ketidakpastian yang dapat menghambat proses penyelesaian konflik. Konsistensi juga telah ditunjukkan sedari awal oleh Dewan Keamanan PBB, hal ini terlihat dari awal PBB memusatkan permasalahan Perang Yaman. Lalu, menunjuk Dewan Keamanan untuk menjadi pihak yang menyelesaikan konflik, mediasi yang koheren, menunjukkan bahwa PBB tidak main-main dalam menyelesaikan persoalan ini dan bertekad untuk memberikan keamanan dan perdamaian bagi seluruh masyarakat Yaman.

Indikator ketujuh adalah *Accountability*, yang mengacu pada hubungan antara pihak yang melakukan intervensi termasuk siapapun yang mereka wakili, dimana selain menjadi sponsor mereka juga harus siap dengan segala resiko atau imbas dari konflik. Prinsip ini menekankan

pentingnya akuntabilitas atas seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan yang diambil selama proses mediasi dan penyelesaian konflik. Dewan Keamanan PBB sebagai mediator harus memastikan bahwa setiap intervensi atau tindakan memiliki dasar hukum dan moral yang kuat. Prinsip tanggung jawab mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala tindakan baik kepada pihak-pihak yang berkonflik di Yaman maupun kepada masyarakat internasional. Pentingnya tanggung jawab juga mencakup pemahaman dan penerimaan risiko yang mungkin timbul selama konflik proses mediasi. Dewan Keamanan PBB telah membuktikan dengan kesiapannya menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul, baik secara politik maupun operasional. Dalam konteks perang saudara di Yaman, Dewan Keamanan PBB sebagai mediator berupaya menjamin bahwa mereka bertanggung jawab atas hasil kerja mediasinya dan siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambilnya. Prinsip akuntabilitas merupakan hal yang sangat dijunjung oleh Dewan Keamanan PBB, hal ini terbukti dengan Dewan Keamanan PBB mendapatkan integritasnya sebagai perantara yang netral dan dapat diandalkan. Dengan menerapkan prinsip ini, Dewan Keamanan PBB dapat membangun kepercayaan semua pihak dan membangun landasan yang kuat bagi solusi berkelanjutan terhadap konflik Yaman.

Dan, indikator terakhir adalah *Universality*, menandakan bahwa para pihak yang melakukan intervensi haruslah diterima dari semua kalangan terutama secara budaya. Prinsip ini menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan harus tepat dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, tanpa memihak salah satu pihak atau kelompok tertentu. Dewan Keamanan PBB sebagai mediator telah memastikan bahwa strategi intervensinya mencerminkan nilai-nilai universal dan tidak menimbulkan konflik budaya atau perbedaan pendapat di antara para pemangku kepentingan. Dalam kasus konflik Yaman, keberhasilan mediasi Dewan Keamanan PBB mungkin bergantung pada kemampuannya untuk mendekati setiap kelompok dengan tetap menghormati nilai, norma, dan budaya mereka. Prinsip universalitas juga mencerminkan keikutsertaan kelompok sosial yang berbeda dalam mediasi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB telah membuka ruang partisipasi dan keterwakilan berbagai kelompok

masyarakat Yaman, hal ini terlihat solusi yang dihasilkan mencerminkan keinginan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Sebagai Manajemen konflik merupakan pendekatan yang tidak hanya berbicara tentang bagaimana menangani konflik, tetapi juga bagaimana mengelola konflik dengan cara-cara kekerasan atau kompetitif dan non-kekerasan atau kooperatif. Prinsip-prinsip mediasi yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB mencakup *Impartiality*, *Mutuality*, *Sustainability*, *Complementary*, *Reflexivity*, *Consistency*, *Accountability*, dan *Universality*. Setiap prinsip ini memiliki peran penting dalam memastikan penyelesaian konflik yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Perang Yaman, Dewan Keamanan PBB telah berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam upaya mencapai gencatan senjata, penyelesaian konflik, dan penciptaan perdamaian yang berkelanjutan. Penekanan pada prinsip-prinsip seperti *Impartiality* dan *Mutuality* menegaskan pentingnya netralitas dan keseimbangan dalam pendekatan mediasi, sementara *Sustainability* menekankan pentingnya upaya yang berkelanjutan dalam mencapai perdamaian jangka panjang.

Prinsip *Complementary* menyoroti pentingnya kerja sama dan koordinasi antara Dewan Keamanan PBB, pemerintah Yaman, kelompok pemberontak Houthi, negara-negara kawasan, dan pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Selain itu, prinsip *Reflexivity* menekankan pentingnya refleksi dan adaptasi terhadap dinamika konflik yang terus berubah, sementara *Consistency* menuntut konsistensi dalam pendekatan dan tindakan Dewan Keamanan PBB. Dalam hal *Accountability*, Dewan Keamanan PBB diharapkan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama proses mediasi, sementara prinsip *Universality* menekankan pentingnya pendekatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, tanpa memihak satu pihak. Siti A., Amir M. - *Cooperative Patterns in The Egyptian Speech Community* 149 atau kelompok tertentu.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan berkesinambungan, Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Yaman dan membangun fondasi yang

kuat untuk stabilitas dan kemakmuran di masa depan. Dengan demikian, peran Dewan Keamanan PBB dalam manajemen konflik di Yaman menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya penyelesaian konflik dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainayyah, Naura H., Joko Setiyono, and H.M. K. Supriyadhie. "Analisis Hukum Humaniter Internasional Pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Yaman." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 441-455, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.27037>
- Aji, M. P., & Indrawan, J. "Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9 no. 3 (2019): 65-83. doi: <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637>
- BBC News. "Yemen: Why is the war there getting more violent? Middle East." April 13, 2023. <https://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-29319423>.
- Encyclopaedia Britannica. "Yemeni Civil War." January 18, 2024. <https://www.britannica.com/event/Yemeni-Civil-War>
- Encyclopaedia Britannica. "Arab Spring." February 25, 2024. <https://www.britannica.com/event/Arab-Spring>.
- Fadila, R. "Peran PBB dalam Menjaga Perdamaian Dunia." *Wartadinus*, October 24, 2023. <https://warta.dinus.ac.id/2023/10/24/peran-pbb-dalam-menjaga-perdamaiaandunia/>.
- Fomerand, J., & Mingst, K., & Lynch, C. M. "United Nations (UN)." Britannica. March 16, 2024 <https://www.britannica.com/topic/United-Nations>.
- Fudhali, A. R. "Studi Deskriptif integratif Upaya PBB dalam Mewujudkan Perdamaian Di Yaman Selama Kurun Perang Sipil 2015 Hingga 2020." *Jurnal Prodi Hubungan Internasional*, 2 no.1 (2022): 75-90.

- FutureLearn. (n.d.). “Types of armed conflict.” <https://www.futurelearn.com/info/courses/international-humanitarian-law-forbusiness/0/steps/342261>
- Global Conflict Tracker. (n.d.). “War in Yemen. Council on Foreign Relations.” <https://www.cfr.org/global-conflicttracker/conflict/war-yemen>
- Permanasari, A. “Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Konflik Internal Pasal yang “ajaib”!.” WordPress. February 05, 2009. <https://arlina100.wordpress.com/2009/02/05/pasal-3-konvensi-jenewa-1949-tentang-konflik-internal-pasal-yang-ajaib/>
- Putri, P. K. “Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.” *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2 no.1 (2022): 16-34.
- Sari, I. “Konflik Internal Negara Yaman Yang Melibatkan Negara-Negara Di Timur Tengah.” *Research Gate* : https://www.researchgate.net/publication/371404730_konflik_internal_negara_yaman_yang_melibatkan_negara_anegara_di_timur_tengah, 2023.
- Stark, A. “A Precarious Moment For Yemen’s Truce. RAND Corporation.” December 13, 2023. <https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/12/a-precious-moment-for-yemens-truce.html>
- Sudira, I. N. “Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia.” *Global: Jurnal Politik Internasional* 19 no.2 (2017): 156-171.